

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERBUATAN PIDANA**

**Studi Koordinasi Antara Penegak Hukum dengan Pemerintah**

**Kabupaten Kendal**

**TESIS**



**Oleh :**

**HATNOLO ARDI**

NIM : MH.15.27.1883

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2017**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERBUATAN PIDANA**

**Studi Koordinasi Antara Penegak Hukum dengan Pemerintah  
Kabupaten Kendal**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**HATNOLO ARDI**

NIM : MH.15.27.1883  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2017**

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERBUATAN PIDANA**

**Studi Koordinasi Antara Penegak Hukum dengan Pemerintah**

**Kabupaten Kendal**

**TESIS**

**Oleh :**

**HATNOLO ARDI**

NIM : MH.15.27.1883  
Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Tanggal, .....

Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.

NIDN : 06-2804-6401

Pembimbing II,

Tanggal, .....

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum.

NIDN : 06-1702-6801

**PENEGAKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERBUATAN PIDANA**  
**Studi Koordinasi Antar Penegak Hukum dengan Pemerintah**  
**Kabupaten Kendal**

**TESIS**

Oleh :

**HATNOLO ARDI**

NIM : MH.15.27.1883  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada hari Jumat tanggal 22 September 2017

Dan Dinyatakan Lulus

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2704-6601

Anggota,

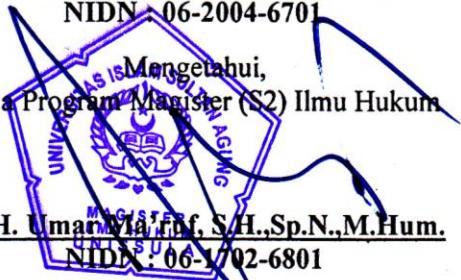
Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.  
NIDN : 06-2804-6401

Anggota

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Maf, S.H.,Sp.N.,M.Hum.  
NIDN : 06-1702-6801

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hatnolo Ardi**  
NIM : MH.15.27.1883  
Alamat : Jalan Mangga Raya No. 14 RT. 01 RW. 08 Purin Ds. Purwokerto Kec. Patebon Kab. Kendal  
Judul Tesis : Penegakan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Hubungannya Dengan Perbuatan Pidana (Studi Koordinasi Antara Penegakan Hukum Dengan Pemerintah Kabupaten Kendal)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Semarang, 27 September 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Hatnolo Ardi  
NIM : MH.15.27.1883

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HATNOLO ARDI**

NIM : MH.15.27.1883

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum UNISSULA Semarang

Alamat Asal : Jl . Mangga Raya No. 14 RT. 01 RW. 08 Desa Purwokerto  
Kec. Patebon Kab Kendal

No. HP/Email : 081325450670/locktangguh@gmail.com

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Tesis dengan judul :

### **PENEGAKAN HUKUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERBUATAN PIDANA**

(Studi Koordinasi Antara Penegak Hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalty non-ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 3 Oktober 2017



## **Motto :**

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

**(Q.S. Al-Baqarah ayat 216)**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

**(Q.S. Al-Insyirah ayat 6-7)**

## **Persembahan :**

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda (Bapak Mulyono alm.) dan Ibunda (Ibu Rahayu Martini) tercinta;
2. Istriku (Desi Wijayanti Ekodewi) tercinta;
3. Putri-putriku (Kalila Jasmine Sabrina dan Sekar Dahayu Kinanti) tersayang;
4. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Angkatan 2015; dan
5. Civitas Akademika UNISSULA.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kelapangan dan kemudahan di dalam penulisan tesis ini serta shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, suri tauladan umat.

Penulis mengucap syukur *alhamdulillah* karena tesis yang berjudul :

**"Penegakan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Hubungannya Dengan Perbuatan Pidana (Studi Koordinasi Antara Penegak Hukum Dengan Pemerintah Kabupaten Kendal)"** diselesaikan.

Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada Ayahanda (Bapak Mulyono alm.) dan Ibunda (Ibu Rahayu Martini) tercinta, Istriku (Desi Wijayanti Ekodewi) dan Putri-putriku (Kalila Jasmine Sabrina dan Sekar Dahayu Kinanti) tersayang, serta Keluarga yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesaiya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, MA, PhD. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I serta Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
5. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pengaji yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan tesis ini;
6. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N.,M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2015 dan teman-teman yang telah membantu hingga terselesaiannya tesis ini.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun tesis ini, semoga selama

penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, September 2017

Penulis

Hatnolo Ardi  
NIM : MH.15.27.1883

## **ABSTRAK**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi masyarakat, maka PNS di seluruh Indonesia harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PNS di Kabupaten Kendal. Bagi PNS yang melakukan pelanggaran dan diduga melakukan perbuatan pidana, maka akan diproses secara hukum. Penegakan hukum dalam bagi PNS yang melakukan perbuatan pidana membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum.

Penelitian ini menggunakan metode *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitiannya bersifat *deskriptif analisis*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Urgensi koordinasi antara penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni : (a) mengetahui status hukum CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang diduga tersangkut masalah hukum pidana, (b) tidak ada tumpang tindih kepentingan dan dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan, serta (c) sebagai upaya penegakan hukum dalam bidang ketertiban dan ketentraman; (2) Koordinasi antar penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tengah dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukannya, yakni : (a) pemerintah Kabupaten Kendal membuat surat kepada (Kepolisian/ Kejaksaan) perihal konfirmasi status/kedudukan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, (b) ditindak lanjuti dengan surat jawaban perihal status/kedudukan CPNS/PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, (c) kepolisian memberikan ruang mediasi (d) kejaksaan menyampaikan kualifikasi pidana yang dilakukan oleh oknum PNS dan menyampaikan sanksi pidananya, serta (e) lingkungan Pengadilan Negeri Kendal mengadili sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Hambatan di dalam melakukan koordinasi antar penegak hukum dengan Pemerintah Kabupaten Kendal terhadap PNS yang sedang dilakukan tindakan penegakan hukum akibat tindak pidana yang dilakukan, antara lain : (a) tidak berjalannya musyawarah atau mediasi, (b) PNS berlindung dan masih berkerabat dengan orang yang mempunyai kewenangan di Pemerintah Daerah, dan (c) kualifikasi tindak pidananya berat sehingga berakibat kepada pemecatan/pemberhentian sebagai PNS. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah : (a) membuat MoU, (b) diselesaikan secara keluargaan, serta (c) melakukan penanganan perkara berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di dalam melaksanakan penanganan perkara.

Kata kunci : *Penegakan Hukum, Pegawai Negeri Sipil, dan Perbuatan Pidana*

## **ABSTRACT**

In carrying out its duties as a public servant, civil servants throughout Indonesia must comply with applicable laws and regulations, including civil servants in Kendal District. For civil servants who committed violations and allegedly committed criminal acts, it will be processed by law. Law enforcement within civil servants who commit crimes requires coordination between local government and law enforcement officials.

This research uses sociological juridical method. The research specification is descriptive analysis. The data used are primary and secondary data, obtained through interview and literature study, which then analyzed qualitatively.

The results of the research indicate that : (1) Urgency of coordination between law enforcement and Kendal District Government if there is a civil servant which is being carried out law enforcement action due to crime which he did, namely : (a) to know the legal status of civil servant/civil servant in Kendal District Government suspected to be involved in criminal law problem; (b) no overlap of interests and in its implementation there are no obstacles, and (c) as law enforcement efforts in the area of order and tranquility; (2) Coordination between law enforcers with Kendal District Government if there are civil servants who are doing law enforcement actions due to criminal acts committed, namely : (a) Kendal District Government to make a letter to (police/prosecutor) regarding the confirmation status/position candidates for civil servants (CPNS)/PNS, (b) followed up with an answer letter regarding the status/position of CPNS/PNS in Kendal District Government, (c) the police provide a mediation room, (d) the prosecutor's office submits criminal qualifications conducted by civil servants and conveyed by the civil servants, and penal sanctions, and (e) the Kendal District Court adjudicates in accordance with applicable laws and regulations; (3) Obstacles in coordinating between law enforcers with Kendal District Government against civil servants who are being carried out law enforcement actions due to criminal acts committed, among others : (a) the failure of deliberation or mediation, (b) civil servants take refuge and are still related to persons who have authority in the local government, and (c) their serious criminal qualifications resulting in dismissal/termination as civil servants. While the solutions to overcome these obstacles are : (a) making the MoU, (b) settled amicably, and (c) handling cases according to the laws and regulations applicable in the handling of cases.

*Keywords : Law Enforcement, Civil Servants, and Criminal Acts*

